

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK DI DESA PALIX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Nurul Rushafah Azzahrawani

Universitas Tanjungpura, e1021211062@student.untan.ac.id

Rupita

Universitas Tanjungpura, rupita@fisip.untan.ac.id

Antonia Sasap Abao

Universitas Tanjungpura, antonia.sasap.abao@fisip.untan.ac.id

Mutmainnah

Universitas Tanjungpura, mutmainnah@fisip.untan.ac.id

Agus Yuliono

Universitas Tanjungpura, agus.yuliono@fisip.untan.ac.id

Habibamirasabania

Universitas Tanjungpura, e1021211075@student.untan.ac.id

Riska Nawila

Universitas Tanjungpura, e1021211059@student.untan.ac.id

Rizka Maulidia

Universitas Tanjungpura, e1021211085@student.untan.ac.id

Abstract

Regional development policies can improve the quality of life and improve population distribution. This is because regional development can open up new sources of income for residents. This study aims to evaluate the level of success of development policies, especially in the field of infrastructure in Pal 9 Village. The tool used to analyze this research is the theory of policy evaluation, where the theory measures the effectiveness of policies and directions for decision-making using size indicators in the form of a. effectiveness, b. efficiency, c. sufficiency, d. alignment, e.g. responsiveness and f. accuracy. The method in this study uses descriptive qualitative, which describes the conditions observed directly in the field in a more specific and in-depth manner. Data were collected through in-depth interviews with stakeholders who were directly involved according to the views, experiences or opinions of residents at the research locations, as well as through documentation studies and relevant literature studies. The results of the study show that regional development and population distribution have shown results by running effectively, this can be seen from infrastructure development in the form of developing roads, transportation facilities and has increased population distribution and accessibility to accessible areas and resource systems by society.

Keywords:

Evaluation, Policy, Population Distribution

Abstrak

Kebijakan pembangunan kawasan dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki distribusi penduduk. Hal tersebut karena pembangunan kawasan dapat membuka sumber-sumber pendapatan baru bagi penduduk setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana tingkat keberhasilan dari kebijakan pembangunan terutama pada bidang infrastruktur di Desa Pal IX. Alat yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan, dimana teori tersebut mengukur efektivitas kebijakan dan arah untuk pengambilan keputusan yang menggunakan indikator ukuran berupa a. efektivitas, b. efisiensi, c. kecukupan, d. pemerataan, e. responsivitas dan f. ketepatan. Metode pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang diamati secara langsung di lapangan dengan lebih spesifik dan mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan stakeholder yang terlibat langsung sesuai dengan pandangan, pengalaman, atau opini penduduk di lokasi penelitian, serta melalui studi dokumentasi dan kajian kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kawasan dan distribusi penduduk telah memperlihatkan hasil dengan berjalan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur berupa pengembangan jalan raya, sarana transportasi dan fasilitas umum lainnya serta telah meningkatkan distribusi penduduk dan aksesibilitas terhadap wilayah dan sistem sumber yang dapat diakses oleh masyarakat.

Kata Kunci :

Evaluasi, Kebijakan, Distribusi Penduduk

PENDAHULUAN

Perubahan pada aspek kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik yang dilaksanakan dengan terencana dapat juga disebut sebagai pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan manfaat yang berkelanjutan. Tujuan kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan proses pembangunan wilayah dapat diukur dengan beberapaindikator, yaitu: (1) pertumbuhan penduduk, (2) mobilitas penduduk, (3) peningkatan aksesibilitas, (4) peningkatan ekonomi masyarakat, (5) penggunaan lahan dan sumber dayaalam, dan (6) kualitas lingkungan.

Kebijakan pembangunan kawasan juga dapat mempengaruhi distribusi penduduk di suatu kawasan. Jika kebijakan pembangunandilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka kebijakan tersebut akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki distribusi penduduk di kawasan tersebut. Kebijakan pembangunankawasan yang dilakukan di suatu kawasan dapat memiliki daya tarik minat investor serta meningkatkan daya persaingan antar industri, sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari distribusi penduduk di suatu kawasan, di mana masyarakat akan cenderung bermigrasi ke kawasan yang memiliki lapangan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, kebijakan pembangunan juga dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, seperti akses terhadap infrastruktur dan fasilitas umum.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar adalah dengan adanya kebijakan pembangunankawasan. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, mengurangi tingkat kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja baru. Namun, pembangunan kawasan juga dapat berdampak terhadap distribusipenduduk di suatu wilayah. Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya salah satu contoh wilayah yang mengalami perubahan distribusi penduduk pasca dilakukannya kebijakan pembangunan kawasan. Berbagai faktor yang mempengaruhi

distribusi penduduk, seperti faktor sosial ekonomi, politik, dan geografis. Pada kawasan pembangunan tersebut terjadi perubahan yang disebabkan karena adanya kebijakan pembangunan kawasan yang dilakukan oleh pemerintah, sehinggaberdampak pada distribusi penduduk di desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Berangkat dari hal tersebut, penting kiranya melakukan evaluasi atas kebijakan pembangunan kawasan untuk melihat dampak dari distribusi penduduk yang dimaksudkan. Suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu hal dapatdisebut sebagai proses evaluasi (Nurkencana:1983). Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur atau memperbaiki suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi bertujuan mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan serta kesuksesan dalam suatu kegiatan maupun program telah tercapai. Dalam hal ini, artikel penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan pembangunan yang ada di desa Pal IX terutama pada bidang infrastruktur. Penelitian serupa terkait evaluasi kebijakan pembangunan ini telah dilakukan oleh Laurencia. G. Ajawaila, dkk (2021) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara”. Penelitian tersebut membahas tentang pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Kecamatan Tobelo. Penelitian tersebut memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara khususnya di daerah Kecamatan Tobelo.

Infrastruktur bagi suatu daerah merupakan pembangunan investasijangka Panjang yang harus dilakukan untuk memajukan suatu daerah bahkan suatu negara. Peningkatan Infrastruktur akan menciptakan kemajuan di berbagai bidang termasukekonomi dan sosial pada suatu daerah, oleh karena itu pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Infrastuktur sangat berperan penting sebagai salah satu penggerak roda kehidupan bagi masyarakat setempat dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itulah, penulis melakukan penelitian terhadap evaluasi kebijakan pembangunan kawasan terutama pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap distribusi penduduk di desa Pal

IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dalam artikel kali ini. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari kebijakan pembangunan kawasan yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan dampak positif dari kebijakan tersebut terhadap distribusi penduduk di desa tersebut. Jika penelitian yang telah disebutkan sebelumnya hanya berfokus pada evaluasi kebijakan pembangunan di suatu daerah. Maka keunikan penelitian yang dilakukan di desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya ini tidak hanya berfokus pada evaluasi kebijakan pembangunan saja, tetapi juga melihat dampak kebijakan pada distribusi penduduk di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan mengidentifikasi masalah-masalah sosial dalam konteks alamiah dengan cara mengumpulkan data-data oleh informan atau situasi dilapangan (Moleong: 2015). Melalui penerapan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Terhadap Distribusi Penduduk” yang berlokasi di desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat akibat adanya kebijakan pembangunan. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti melalui wawancara secara mendalam terhadap informan atau stakeholder terkait di sekitar kawasan pembangunan, observasi langsung ke lapangan, serta dokumentasi. Teknik penentuan informan pada penelitian ini dengan teknik purposive sampling dengan kriteria informan sebagai berikut: (1) Usia 17-45 tahun, (2) Laki-laki atau perempuan, (3) bekerja atau bersekolah, (4) Menggunakan akses fasilitas umum, (5) Tinggal disekitar kawasan pembangunan.

HASIL

Desa Pal IX telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan penduduk, perubahan ekonomi,

serta faktor-faktor lingkungan telah membentuk struktur sosial-ekonomi yang berbeda. Selama penelitian ini kami melakukan analisis yang cermat terhadap data populasi, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan, dan faktor-faktor sosial lainnya yang berdampak pada pembangunan Desa Pal IX.

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat pencapaian tujuan dari kebijakan yang dilakukan, karena tidak semua program kebijakan telah mencapai tujuan yang diinginkan, oleh karena itu evaluasi juga melihat bagaimana kendala-kendala yang dihadapi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, sehingga tujuan kebijakan tersebut belum atau tidak tercapai dan setelah mengetahui kendala-kendala tersebut dapat diperbaiki sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah mengenai persebaran penduduk di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Provinsi Kubu Raya antara lain:

1. Infrastruktur dan Aksesibilitas Desa

Ketersediaan infrastruktur yang baik akan berdampak positif pada distribusi penduduk di desa Pal IX. Kemudahan akses transportasi dan telekomunikasi, baik melalui jalan raya, jaringan listrik, air bersih dan sanitasi yang memadai akan membuka peluang untuk lebih banyak orang untuk menetap di desa Pal IX ini.

2. Potensi Ekonomi Desa

Potensi ekonomi desa dapat menjadi alasan penduduk untuk menetap dan berkembang di desa Pal IX. Dalam hal ini, potensi sektor pertanian dan perikanan yang masih banyak dikembangkan menjadi daya tarik warga untuk tinggal dan menciptakan usaha di desa Pal IX.

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan di desa Pal IX juga memiliki dampak pada distribusi penduduk. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan, seperti penyediaan lahan untuk usaha, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan akan dapat menarik masyarakat untuk menetap dan membangun di desa ini.

4. Kondisi Sosial dan Budaya

Pembangunan kawasan juga perlu memperhatikan kondisi sosial dan budaya

masyarakat setempat. Terdapat budaya yang menjadi identitas masyarakat desa Pal IX, seperti adat istiadat, kesenian, dan kerajinan tradisional. Pembangunan yang tetap memperhatikan dan mengakomodasi kondisi sosial dan budaya masyarakat akan membantu mempertahankan identitas masyarakat serta menjaga keharmonisan dan kesatuan.

Namun, perlu diingat bahwa pembangunan kawasan juga dapat memiliki dampak negatif pada distribusi penduduk, seperti meningkatnya harga tanah dan biaya hidup yang tidak terjangkau bagi sebagian warga. Oleh karena itu, pembangunan kawasan perlu dilakukan secara bertahap dan antusias dalam melindungi lingkungan serta berkembang secara berkelanjutan, agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Salah satu faktor yang tidak berpengaruh pada kebijakan pembangunan kawasan terhadap distribusi penduduk di desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya adalah faktor cuaca. Cuaca yang buruk seperti hujan lebat atau banjir dapat mempengaruhi kondisi pembangunan kawasan, namun tidak berpengaruh pada distribusi penduduk di desa Pal IX. Hal ini dikarenakan faktor cuaca tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur sosial dalam masyarakat desa.

Faktor cuaca lebih berpengaruh pada produksi pertanian dan kemampuan akses penduduk terhadap fasilitas atau layanan publik (jalan, air bersih, listrik). Selain itu, dampak cuaca biasanya bersifat sementara dan dapat diatasi dengan perbaikan fasilitas infrastruktur atau kebijakan pengelolaan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, faktor cuaca tidak dapat dijadikan indikator utama dalam mengukur kondisi pembangunan kawasan dan distribusi penduduk di desa Pal IX adalah aspek sosial-ekonomi seperti akses pendidikan dan kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, serta kondisi kesehatan dan keselamatan lingkungan. Dalam kasus ini, pemerintah daerah dan masyarakat desa perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan memperkuat daya saing ekonomi lokal. Oleh karena itu, faktor cuaca tidak dapat dijadikan sebagai faktor utama dalam pembangunan kawasan dan distribusi penduduk di desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan pembangunan kawasan juga dapat mempengaruhi migrasi penduduk antar wilayah seperti adanya peningkatan kesempatan kerja. Ketika kawasan mengalami pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka kesempatan kerja baru akan muncul. Hal ini dapat menarik penduduk dari wilayah lain yang mencari pekerjaan serta meningkatkan tingkat migrasi menuju kawasan tersebut. Selain itu, adanya pembangunan perumahan pada kawasan desa Pal IX ini membuat banyak penduduk untuk bermigrasi ke wilayah tersebut. Dengan ketersediaan perumahan yang terjangkau dapat menjadi faktor penting dalam menarik penduduk baru.

Selain itu, pembangunan kawasan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pembangunan kawasan yang terencana dengan baik dapat mendorong pengembangan industri di daerah tersebut. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, perusahaan dapat dengan mudah membangun pabrik, pabrik pengolahan, atau fasilitas produksi lainnya. Ini dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing industri. Dalam jangka panjang, pengembangan industri ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur kawasan, seperti jalan raya dan jembatan, dapat meningkatkan aksesibilitas dari kawasan tersebut. Ini memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, mempermudah distribusi produk, dan memperluas pasar. Dampaknya adalah meningkatnya aktivitas ekonomi, perdagangan, dan investasi di kawasan tersebut.

Perubahan infrastruktur kawasan desa Pal IX dari masa ke masa telah terjadi secara signifikan. Pada masa lampau kawasan daerah ini memiliki infrastruktur yang sangat sederhana, terdiri dari jalan raya yang masih sempit dan kurang terawat, jumlah rumah penduduk yang masih sedikit, dan belum dilakukan pembangunan pabrik, karena masih minimnya kegiatan pembangunan suasana di desa ini pun masih terasa nyaman dan asri. Namun seiring berjalannya waktu, infrastruktur kawasan desa semakin membaik yang terlihat dari pelebaran jalan yang semakin progresif, banyaknya pemukiman penduduk dan bangunan pabrik. Karena semakin banyak proses

pembangunan yang dilakukan suasana desa pun terasa lebih panas dan berdebu.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini digunakan konsep teori “Evaluasi Kebijakan” oleh William N. Dunn (2003), yang mengatakan bahwa istilah evaluasi ini memiliki makna yang berhubungan satu sama lain yang berfokus pada penggunaan beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Teori evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn ini adalah pendekatan mendalam mengenai cara memahami serta mengevaluasi kebijakan publik. Sebagaimana pentingnya mempertimbangkan konteks kebijakan dan kompleksitasnya dalam proses evaluasi. Evaluasi ini akan memberikan data informasi yang valid serta dapat dipercaya tentang proses kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kebutuhan, nilai dan juga peluang yang telah tercapai melalui aksi publik, tidak hanya itu, evaluasi akan memberikan sumbangan terhadap pengaplikasian pada metode analisis kebijakan, seperti aktivitas dalam perumusan masalah dan membuat rekomendasi. Adapun indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang memiliki 6 aspek, yaitu:

1. Efektivitas

Pada proses evaluasi, peneliti ingin menggambarkan letak dari efektivitas ketercapaian hasil. Dengan mendeskripsikan hasil yang ingin dicapai melalui suatu kebijakan yang telah terwujud sesuai dengan perencanaan. Pembangunan dapat dikatakan efektif, apabila dapat memberikan manfaat serta nilai guna bagi penduduk di suatu daerah. Dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di desa Pal IX ini dapat dikatakan cukup efektif, dikarenakan indikator pengukuran berupa efektivitas program dalam implementasi kebijakan, serta sarana dan prasarana pada kemudahan akses jalan telah tercapai, yang dapat dilihat dari dibangunnya infrastruktur jalan sejauh 12 km yang diukur dari batas kota Pontianak Barat dan Kabupaten Kubu Raya hingga ke jalan Parit Penjara. Dan juga dapat terlihat dari pembangunan infrastruktur lainnya seperti:

pembangunan perumahan, pabrik, serta perusahaan yang dapat membuka lapangan kerja baru bagi penduduk di desa Pal IX.

2. Efisiensi

Tujuan dari kriteria ini adalah pertanyaan tentang sumber daya, yaitu peneliti ingin menggambarkan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan kawasan guna mencapai tujuan yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat merasakan perubahan infrastruktur setelah dilakukannya pembangunan, hal ini dapat dilihat dari partisipasi pemerintah yang membuat kebijakan pembangunan serta partisipasi masyarakat sekitar untuk membantu membangun jalan di gang atau komplek.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil temuan (Tesyalom Sembel. dkk, 2017), yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan suatu pembangunan. Manfaat keberhasilan dari pembangunan juga dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah tersebut. Maka dari itu, partisipasi masyarakat sangat penting bagi pembangunan, karena masyarakat itu sendiri yang lebih tahu kebutuhan mereka, sehingga pembangunan dapat berjalan secara efisien.

3. Kecukupan

Kriteria ini lebih memperhatikan kecukupan hasil kebijakan untuk mengatasi masalah kebijakan, atau sejauh mana hasil dapat dicapai untuk mengatasi masalah kebijakan. Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk menganalisis secara langsung pencapaian yang telah dilakukan dari kebijakan pembangunan di desa Pal IX. Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sudah serius, namun dalam jumlah proyek yang dilakukannya kurang sejalan dengan mutu hidup penduduk setempat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil temuan (Anisah Farras Nabilah. dkk, 2022), sebuah kebijakan dapat dinilai baik jika kebijakan tersebut memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hasil yang sudah dicapai dapat dipertahankan dengan baik oleh masyarakat serta masyarakat mampu mengembangkannya menjadi lebih baik, lebih luas nilai manfaatnya. Hal tersebut juga sudah

dituturkan oleh salah satu penduduk desa Pal IX bahwa penduduk sudah merasa cukup dengan adanya pembangunan yang ada di desa tersebut.

4. Kemerataan

Kriteria ini mendeskripsikan manfaat dari pembangunan dengan didistribusikannya secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya penduduk di desa Pal IX. Pada pembangunan di desa Pal IX ini terdapat pembangunan jalan raya, mulai dari perbatasan antara kota Pontianak dan desa Pal IX. Namun pembangunan jalan belum sepenuhnya merata di daerah tempat tinggal penduduk seperti dalam gang dan kompleks perumahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil temuan (Agustinus Lejiu. dkk, 2014), yang menyatakan bahwa adanya kebijakan pembangunan perlu diukur kebermanfaatannya secara merata pada kelompok sasaran tersebut. Dengan menjadikan para transmigran sebagai tenaga kerja dalam perusahaan merupakan manfaat dari kebijakan pembangunan transmigrasi tersebut.

5. Responsivitas

Maksud dari kriteria ini adalah lebih fokus kepada kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya pada kelompok sasaran atau penerima manfaat dari pembangunan kawasan, melalui deskripsian apakah dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat sudah merasa puas dan memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan atau tidak. Pada pembangunan di desa Pal IX, terdapat respon positif dan negatif penduduk terhadap pembangunan yang telah dilakukan maupun yang masih berjalan. Respon positif dapat dilihat dari adanya dukungan masyarakat terhadap proses pembangunan, hal ini dapat diperkuat dengan penuturan dari salah satu penduduk yang mengatakan bahwa jalanan menjadi lebih luas, ramai dan nyaman untuk digunakan serta efisiensi waktu dan biaya. Kemudian respon negatif penduduk berupa adanya keluhan penduduk akibat proses pembangunan yang menyebabkan suasana desa menjadi lebih panas dan berdebu. Hal ini dirasakan oleh penduduk itu sendiri, mereka yang sebelumnya jarang menggunakan kipas angin dan AC, sekarang menjadi lebih sering menggunakannya.

6. Ketepatan.

Kriteria presisi ini menganalisis tentang

kebermanfaatan dari kebijakan yang ada di desa Pal IX, terutama dengan menggambarkan hasil yang telah diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di desa Pal IX tersebut. Penduduk di desa Pal IX juga sudah merasakan sendiri dampak positif dan negatif dari pembangunan yang telah dilakukan di daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil temuan (Helena A. dan Esa Wahyu. E, 2022), yang menyatakan bahwa pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sudah tepat waktu dan sasaran, segala perencanaan dan pelaksanaan programnya sesuai ketentuan. Dengan adanya program pembangunan ini dapat meningkatkan infrastruktur berupa jalan, transportasi, dan lain-lain. Pembangunan ini dapat dikatakan sudah tepat karena dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar pembangunan.

Dalam penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi pengambilan data di lapangan dari penelitian yang dilakukan, yang diantaranya sebagai berikut :

- a) Dana yang disediakan untuk melakukan penelitian ini sangat terbatas.
- b) Saat melakukan penelitian pihak stakeholder desa Pal 9 tidak mudah untuk dihubungi.
- c) Responden belum bisa memaparkan dengan rinci jawaban dari pertanyaan yang diajukan

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu evaluasi dari dampak kebijakan pembangunan kawasan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan kawasan di Desa Pal IX memiliki dampak yang signifikan terhadap distribusi penduduk. Telah terjadi peningkatan jumlah penduduk di daerah tertentu yang menjadi fokus pembangunan, sementara daerah tempat tinggal penduduk mengalami perubahan yang lebih sedikit atau bahkan penambahan jumlah penduduk yang menetap di daerah tersebut. Penelitian ini mengungkapkan adanya perubahan dalam pola penyebaran penduduk di Desa Pal IX. Terjadi konsentrasi penduduk yang lebih tinggi di sekitar area pembangunan atau pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Pola ini dapat berpengaruh pada perubahan sosial, infrastruktur, dan

layanan masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi kebijakan pembangunan kawasan dan distribusi penduduk di desa pal 9 kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya dengan 6 aspek William N Dunn, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aspek tujuan dan sasaran kebijakan: Kebijakan pembangunan kawasan dan distribusi penduduk di desa pal 9 kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya memiliki tujuan yang jelas yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Namun dalam implementasinya, kurang terdapat sasaran yang konkrit dan terukur sehingga kurang optimal dalam mencapai tujuan tersebut.
2. Aspek isu kebijakan: Isu utama kebijakan ini adalah pemukiman yang kurang layak di desa pal 9. Kebijakan ini berusaha untuk memperbaiki fasilitas pemukiman dan membangun kawasan pariwisata di desa pal 9.
3. Aspek alternatif kebijakan: Terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki fasilitas pemukiman dan mengembangkan potensi pariwisata di desa pal 9. Beberapa alternatif tersebut adalah membangun pengolahan sampah yang lebih baik, menumbuhkan koperasi warga untuk mengembangkan potensi wisata, atau mengembangkan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat desa.
4. Aspek evaluasi kebijakan: Evaluasi kebijakan yang dilakukan kurang optimal karena kurang adanya pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Evaluasi yang baik harus memperhatikan data dan fakta yang akurat dan transparan.
5. Aspek partisipasi masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pembangunan kawasan dan distribusi penduduk di desa pal 9 kurang optimal. Seharusnya partisipasi masyarakat dilibatkan dalam semua tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.
6. Aspek sumber daya yang tersedia: Sumber daya yang tersedia dalam kebijakan ini tidak sepenuhnya dioptimalkan. Pemerintah setempat perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada seperti SDM maupun keuangan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan kawasan dan distribusi penduduk di desa pal 9. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan

untuk perbaikan kebijakan pembangunan kawasan di Desa Pal IX. Saran ini dapat mencakup penyesuaian prioritas pembangunan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, pengembangan program peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja, atau peningkatan akses terhadap layanan sosial dan kesehatan. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan pembangunan kawasan di Desa Pal IX dan dampaknya terhadap distribusi penduduk serta aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Saran perbaikan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan di masa depan.

Kebijakan pembangunan yang baik harus memperhatikan kebutuhan penduduk desa, meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, transportasi dan listrik, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal dengan pendekatan berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, kebijakan pembangunan yang baik juga harus memperhatikan dampak ekologis dan sosial dari pembangunan. Disarankan juga untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan yang nantinya dapat dikembangkan lagi, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mendalami serta mengkaji lebih dalam lagi mengenai topik yang akan dibahas pada penelitian dengan melalui beberapa referensi serta sumber-sumber, seperti: jurnal-jurnal penelitian terdahulu, buku dan media lainnya dengan mengkaji variabel indikator dan metode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Riza (2013). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Sebagai Central business District (CBD). Malang . Skripsi : Universitas Brawijaya
- Ajawaila. G. Laurencia dkk. (2021) Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Administrasi Publik : Vol V I, No 104.
- Anton , Mizhar. S, Mardiyono dan Prasetya Y.W . (2014) . Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar. Jurnal

- Admnistrasi Publik: Vol 2, No. 11.
- Astika, Agus Nyoman da Subaa, Nyoman Sri. (2021) Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora; Vol 5, No.2.
- Brith, Roland Sangen. (2017). Evaluasi Pembangunan di Bidang Infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur Pasca Pemekaran Daerah. Jurnal Administrasi Reform : Vol 5 , No.3.
- Erlinda, Novita. (2016). Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Provinsi Jambi melalui Pendekatan Model Flag. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
- Munang, Aswan dkk. (2016). Evaluasi dan Perencanaan Mitigasi Risiko Proyek Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Semarang-Bojonegoro. Teknoin : Vol 22, No, 2.
- Nuryadin, Didi dan Suharsih, Sri. (2017). Analisis dan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Terhadap Indikator Kinerja Pembangunan di Daerah Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003-2013. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan : Vol 18, No.1.
- Rachmadi, M (2019). Evaluasi Pengembangan Kawasan Afirmatif Menuju Desa Mandiri. Jurnal Kebijakan Pemerintahan: 1 , 45-60.
- Ra' is D.U.& Rini, Y.T. (2018). Analisa Peran Partisipatif dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Reformasi: 8(2), 143.
- Renggi, Dicky Ssiwanto T dan Rusmiwari, Sugeng (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Vol 8, No. 4.
- Setyoati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang. Jispo, 9(2), 170-188
- Rorimpondey, Megawati Cindy dan Nurdin Ismail. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP0 Di Desa Loopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Manajemen Pemerintahan: Vol 11, No.
- Yovinus dan Nikodimus(20220. Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah tertinggal. Fokus; Vol 20, No.2.